

Press release

Media Briefing: Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya Pada Kebijakan Transportasi Publik serta Energi Terbarukan

Jakarta, 9 September 2022 - Ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) di sektor transportasi menyebabkan kepanikan di masyarakat dan kebijakan reaktif dari pengambil kebijakan. Pada 2020, 87% konsumsi energi di sektor transportasi adalah bahan bakar minyak sedangkan 13% sisanya berupa bahan bakar nabati. Celakanya, 70% dari konsumsi bensin dan 15% dari konsumsi diesel berasal dari impor sehingga membuat harga bahan bakar transportasi sangat dipengaruhi oleh dinamika harga minyak dunia. Ketergantungan terhadap impor BBM ini menyebabkan membengkaknya pengeluaran devisa dan subsidi dari pemerintah, terutama di tengah lonjakan harga minyak dunia seperti saat ini. Keputusan untuk menaikkan harga jual BBM pun menimbulkan gejolak di masyarakat karena besarnya dampak pada kehidupan sehari-hari. Pengguna kendaraan pribadi secara langsung merasakan peningkatan biaya transportasi. Di segmen logistik, kenaikan harga BBM turut mendongkrak harga barang akibat meningkatnya biaya distribusi.

Pengguna dan operator transportasi publik pun mengalami dampak langsung. Seperti yang terlihat di beberapa kota di Indonesia di mana para operator transportasi publik langsung menaikkan tarif dan mengurangi jam layanan transportasi publik karena tidak adanya jaminan dari pemerintah. Seperti di Jakarta, Organisasi Angkutan Umum Darat (Organda) DKI Jakarta berencana untuk menaikkan tarif transportasi publik yang tidak terintegrasi dengan sistem JakLingko, begitu juga operator Batik Solo Trans (BST) yang secara bersamaan juga mengharapkan adanya penyesuaian kontrak Buy The Service (BTS) dari Kementerian Perhubungan. Sementara di Yogyakarta dan Bandung, Trans Jogja dan Trans Metro Bandung (TMB) berencana mengurangi jumlah armada dan waktu operasional.

Menanggapi hal ini, **Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)**, **Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI)**, **Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB)** dan **Institute for Essential Services Reform (IESR)** bersinergi merilis poin-poin tanggapan serta rekomendasi kepada pemerintah pusat maupun pemerintah kota untuk merefleksikan kenaikan harga BBM ini sebagai momentum mengubah arah kebijakan yang dapat dibaca lengkap [di sini](#).

Revy Petrigradia, Ketua Forum Pembiayaan Transportasi - Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI): *"Ini adalah momentum untuk reformasi transportasi publik. Saat ini penyediaan transportasi yang bersifat massal masih difokuskan pada 10 kota besar Indonesia, di mana belum seluruhnya mengakomodir layanan Bus Rapid Transit (BRT). Kinerja layanan transportasi publik di Indonesia masih cukup rendah dikarenakan masih belum memprioritaskan transportasi massal (BRT/LRT/MRT)."*

Etsa Amanda, Sr. Transport Policy and Development Associate - ITDP Indonesia: *"Tekanan untuk mengurangi biaya transportasi akibat kenaikan harga BBM sebaiknya tidak ditanggapi dengan diturunkannya tarif parkir, pemberian subsidi terhadap tarif ojek online dan taksi, pelonggaran kebijakan ganjil-genap, atau pemberian insentif tambahan lainnya untuk penggunaan kendaraan bermotor pribadi."*



Strategi pengurangan biaya transportasi perlu difokuskan pada penyediaan transportasi publik yang terjangkau dan dapat diandalkan. Dalam jangka pendek, Pemerintah paling tidak tetap perlu menjaga status quo dari kebijakan terkait push strategy yang telah berjalan."

Julius Christian, Clean Fuel Specialist - Institute for Essential Services Reform (IESR): *"Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak di masa depan, pemerintah perlu mempercepat transisi ke sistem transportasi berbasis listrik energi terbarukan. Kemudahan-kemudahan dalam memperoleh kendaraan pribadi berbahan bakar minyak perlu dikurangi, bahkan seharusnya sudah dicanangkan pelarangan penjualannya untuk 10-20 tahun mendatang."*

Ahmad Safrudi, Direktur Eksekutif - Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB): *"Jika dilihat dari konsumsi BBM, sepeda motor adalah pengguna BBM terbesar (studi KPBB 2011), sekitar 37%. Dengan ketiadaan transportasi publik di kota-kota di Indonesia akan mendorong orang untuk mencari alternatif transportasi yang tidak efisien dari segi pemanfaatan BBM. Peningkatan kepemilikan sepeda motor merupakan bukti kegagalan pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang tepat dan penyediaan transportasi umum yang mudah diakses oleh masyarakat. Bahkan bisa mengakibatkan semakin tingginya konsumsi BBM dari tahun ke tahun sehingga akan menambah beban fiskal pemerintah."*

Rekomendasi Kenaikan Harga BBM dan Dampaknya Pada Kebijakan Transportasi Publik dan Energi Terbarukan

Berikut poin-poin rekomendasi dari Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) dan Institute for Essential Services Reform (IESR) terkait kenaikan harga BBM dan kaitannya dengan kebijakan transportasi publik dan energi terbarukan:

1. Realokasi Subsidi BBM

Selain mengalihkan subsidi untuk sistem transportasi publik yang sudah ada seperti Transjakarta, Trans Semarang, Batik Solo Trans, pemerintah juga perlu mengembangkan transportasi publik baik yang berbasis rel maupun jalan di kota-kota besar agar mobilitas masyarakat dapat terjamin apabila terjadi gejolak harga BBM dunia di masa yang akan datang. Berdasarkan keterangan Menteri Keuangan pada 3 September yang lalu, 'opportunity cost' dari subsidi BBM bisa mencapai 500 Triliun Rupiah dalam 1 tahun. Itu kurang lebih setara dengan 500 KM jalur MRT.

2. Penyediaan dan Pengembangan Layanan Transportasi Publik yang Merata

Kenaikan harga BBM pada akhirnya dapat dilihat sebagai sebuah momentum untuk dapat mendesak kota-kota di Indonesia untuk segera menyelenggarakan dan/atau bahkan memperbaiki ketersediaan, layanan, dan keterjangkauan transportasi publik dalam kotanya. Bila tidak direspon cepat, maka kesempatan ini akan hilang dan warga kota akan mencari cara lain untuk tetap dapat mengakses kendaraan bermotor pribadi, utamanya sepeda motor. Kekhawatiran ini didasari oleh adanya tren kenaikan penjualan sepeda motor di tahun 2005 meski telah ada 2 kali kenaikan harga BBM Premium saat itu. Tren yang serupa juga berulang untuk kasus yang sama di tahun 2008, 2013, dan 2016 (dibandingkan dengan tahun 2015, saat ada kenaikan harga BBM).



3. Kebijakan yang Menyokong Peningkatan Kualitas Layanan Transportasi Publik

Meningkatnya penggunaan transportasi publik secara langsung pun akan meningkatkan efisiensi biaya penyelenggaraan transportasi publik itu sendiri. Dalam jangka pendek, Pemerintah paling tidak tetap perlu menjaga status quo dari kebijakan terkait *push strategy* yang telah berjalan agar momentum penyelenggaraan – dan penggunaan – transportasi publik dapat termanfaatkan dengan baik dan mewujudkan sistem transportasi yang memiliki konsumsi energi dan ruang jalan yang lebih efisien serta ramah lingkungan ke depannya. Dalam jangka menengah dan panjang, rencana-rencana pemerintah untuk menerapkan kebijakan *push strategy* lainnya tetap harus dilanjutkan.

4. Percepatan Elektrifikasi Transportasi dan Pengembangan Energi Terbarukan

Dalam jangka panjang, peralihan ke transportasi berbasis listrik energi terbarukan, baik untuk transportasi publik maupun kendaraan pribadi, akan membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak. Harga listrik dari energi terbarukan lebih tahan terhadap fluktuasi harga komoditas global dibanding bahan bakar minyak sehingga dapat menekan gejolak serupa di masa depan. Selain itu, sumber energi terbarukan tersedia secara berlimpah di Indonesia, sehingga akan berdampak positif bagi ketahanan energi nasional. Karena itu, pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan mampu menarik investasi di transportasi berbasis listrik dan energi terbarukan. Pemberian insentif untuk kendaraan pribadi berbahan bakar minyak perlu dikurangi, diikuti dengan rencana pelarangan penjualan di jangka panjang.

=====

Narahubung

Fani Rachmita | Sr. Communications & Partnership Manager, ITDP Indonesia | +62 812-8623-7694

Uma | Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) | +62 812-9000-3130

Amalia S Bendang | Program Officer Komite Penghapusan Bensin Bertimbel (KPBB) | +62 856-7706-934

Julius Christian | Clean Fuel Specialist IESR | +62 895-2098-2309